

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ADITHYA SURYA PERDANA

NPP. 32.0267

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [32.0267@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0267@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Aleknaek Martua, M.E.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *This study departs from the contradiction between the success of the Collaborative Governance approach in empowering MSMEs in Bandar Lampung City, as evidenced by national awards and an increase in GRDP, and the fundamental implementation challenges that still exist. Crucial issues such as a lack of synchronization between agencies, inconsistent stakeholder commitment, and the failure of partnership programs are the focus of analysis. Purpose:* The main objective of this study is to identify and analyze the implementation of Collaborative Governance in SME empowerment in Bandar Lampung City. **Method:** The approach used in this study is qualitative descriptive, where the main objective is to provide a systematic and accurate description of how Collaborative Governance in SME empowerment can be optimized to encourage local economic growth. Informants were selected using purposive sampling, consisting of key actors in the MSME empowerment ecosystem in Bandar Lampung City, namely government officials (Head of Department, Secretary, Head of Cooperatives and MSMEs), banking representatives, and MSME actors. **Results/Findings:** The research findings indicate that the collaborative process has been effective through a cycle of dialogue, trust building, commitment, mutual understanding, and positive outcomes, such as an increase in the number of MSMEs that have “moved up the ladder.” However, this process began with initial conditions of resource imbalances and low levels of trust. Institutional design, despite having clear formal rules, is hampered by communication gaps. Leadership is considered capable of facilitating dialogue, but is perceived as lacking inclusiveness and consistency by MSME actors. **Conclusion:** The implementation of Collaborative Governance in MSME empowerment in Bandar Lampung City is dynamic and has shown positive results. However, this success is marred by challenges in every dimension, from the initial imbalance, institutional design that has not been well socialized, to leadership whose implementation is perceived as inconsistent and non-inclusive by micro-scale MSMEs. **Keywords:** Collaborative Governance, MSME Empowerment, Local Government, Local Economy, Bandar Lampung City.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berangkat dari kontradiksi antara keberhasilan pendekatan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, yang dibuktikan dengan penghargaan nasional dan peningkatan PDRB, dengan tantangan implementasi fundamental yang masih ada. Masalah krusial seperti kurangnya sinkronisasi antarinstansi, komitmen *stakeholder* yang tidak konsisten, dan kegagalan program kemitraan

menjadi fokus untuk dianalisis. **Tujuan:** Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dimana tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang bagaimana *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM dapat dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari aktor kunci dalam ekosistem pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, yaitu unsur pemerintah (Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Koperasi dan UKM), perwakilan perbankan, dan pelaku UMKM. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif (*collaborative process*) telah berjalan efektif melalui siklus dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil yang positif, seperti peningkatan jumlah UMKM yang "naik kelas". Namun, proses ini diawali dengan kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya dan tingkat kepercayaan yang rendah. Desain institusi, meskipun memiliki aturan formal yang jelas, efektivitasnya terhambat oleh kesenjangan komunikasi. Kepemimpinan dinilai mampu memfasilitasi dialog, namun dirasa kurang inklusif dan konsisten oleh pelaku UMKM. **Kesimpulan:** Penerapan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung berjalan dinamis dan berhasil menunjukkan hasil positif. Meskipun demikian, keberhasilan ini diwarnai oleh tantangan pada setiap dimensinya, mulai dari kondisi awal yang timpang, desain institusi yang belum tersosialisasi dengan baik, hingga kepemimpinan yang implementasinya dirasa kurang konsisten dan inklusif oleh UMKM skala mikro.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pemberdayaan UMKM, Pemerintah Daerah, Ekonomi Lokal, Kota Bandar Lampung.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan usaha di setiap sektor ekonomi Putri (2017) dalam (Negari et al. 2022). Pemberdayaan manusia melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM sangat dianggap memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, sebagian besar usaha di Indonesia adalah usaha kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang terserap melalui aktivitas UMKM tersebut (Putri dan Ganindha 2022). UMKM memiliki peran strategis yang tak terbantahkan, di mana sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lebih dari 90% lapangan kerja di seluruh negeri. Kontribusi masif ini menjadikan program pemberdayaan UMKM sebagai agenda krusial untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, pengembangan UMKM di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Kendala utama yang paling sering ditemui adalah akses terbatas ke sumber permodalan, yang disebabkan oleh persyaratan yang rumit dan suku bunga yang tinggi. Selain itu, banyak UMKM belum dikelola dengan manajemen yang terorganisir, sehingga menghadapi kesulitan dalam perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan strategi pemasaran. Keterbatasan dalam inovasi produk, ketergantungan pada pasar tradisional, serta persaingan ketat dengan perusahaan skala besar juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam konteks lokal, Kota Bandar Lampung merefleksikan dinamika tersebut. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi, UMKM di Bandar Lampung memegang peranan signifikan dalam menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan produk-produk daerah. Sektor ini mencakup berbagai bidang industri, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga perdagangan dan jasa, didukung oleh potensi pasar yang besar dari penduduk lokal maupun wisatawan. Meskipun demikian, pelaku usaha di Bandar Lampung juga menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan modal, minimnya keahlian manajerial, dan kesulitan dalam memasarkan produk secara luas.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan UMKM yang membuahkan hasil signifikan dan meraih pengakuan nasional melalui penghargaan "Pemimpin Daerah Awards 2024". Fokus kebijakan pemerintah daerah terletak pada fasilitasi akses permodalan yang lebih mudah, penyelenggaraan pelatihan usaha secara masif, dan penciptaan regulasi yang mendukung iklim pertumbuhan UMKM. Program-program ini terbukti berhasil mendorong pertumbuhan lebih dari 6.800 UMKM baru, yang secara langsung menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

**Gambar Pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024

Data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung memperkuat klaim keberhasilan ini. Gambar pertumbuhan UMKM dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik dari jumlah unit usaha maupun kontribusinya terhadap PDRB lokal. Jumlah UMKM meningkat dari 5.200-unit pada tahun 2019 menjadi 6.800-unit pada tahun 2023. Seiring dengan itu, kontribusi mereka terhadap PDRB kota juga meningkat dari 45% menjadi 55% dalam periode yang sama. Angka-angka ini membuktikan bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian di Kota Bandar Lampung.

Kunci dari keberhasilan ini adalah penerapan pendekatan *Collaborative Governance*, yaitu sebuah paradigma tata kelola yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. *Collaborative Governance*, sebagaimana didefinisikan oleh Ansell dan Gash, merupakan sebuah pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengadopsi

pendekatan ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Meskipun telah meraih penghargaan dan menunjukkan data pertumbuhan yang positif, implementasi *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung masih menyisakan sejumlah tantangan. Masalah utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya sinkronisasi program antarinstansi, keterbatasan sumber daya untuk mendukung kegiatan kolaborasi, serta lemahnya komunikasi di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat komitmen dari berbagai pihak yang terlibat seringkali tidak konsisten, sehingga mengurangi efektivitas program. Tantangan spesifik juga muncul dalam kolaborasi dengan sektor swasta, terutama perbankan. Contohnya, meskipun pemerintah telah meluncurkan program pinjaman tanpa bunga, banyak pengajuan dari pelaku UMKM yang ditolak oleh bank karena tidak memenuhi kriteria BI Checking.

Berdasarkan latar belakang tersebut, di mana terdapat keberhasilan yang diiringi oleh tantangan yang persisten, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana *Collaborative Governance* dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tantangan serta peluang yang ada, dan bagaimana peran pemerintah daerah dapat diperkuat dalam mendorong keberhasilan program ini.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan permasalahan (research gap) penelitian ini terletak pada kontradiksi antara keberhasilan pendekatan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan tantangan fundamental yang masih ada dalam implementasinya. Meskipun pendekatan ini telah menghasilkan capaian positif yang terukur, seperti penghargaan nasional dan peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB, pelaksanaannya masih diwarnai oleh masalah krusial seperti kurangnya sinkronisasi antar instansi, komitmen stakeholder yang tidak konsisten, dan kegagalan dalam program kemitraan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana sebuah model yang berhasil secara makro dapat dioptimalkan dengan mengatasi kelemahan-kelemahan operasionalnya agar memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

1. Arbianti, S. (2024). Empowerment of Small and Micro Enterprises (SMEs) in Indonesia: The Impact Venture Capital Assistance, Entrepreneurial Orientation, and Digital Transformation on the Performance of SMEs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dari LazisMu dan transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, sementara orientasi kewirausahaan tidak. Transformasi digital meningkatkan efisiensi dan strategi bisnis, membantu UMKM bersaing lebih baik. Temuan ini menjadi masukan penting bagi LazisMu dan lembaga serupa untuk mendukung UMKM secara lebih efektif melalui riset lanjutan dan pendekatan kualitatif.
2. Rahmawati, Dewi & Nawangsari, Ertien. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pada Umkm Kampung Kue. *Jurnal Kebijakan Publik*. 14. 507. 10.31258/jkp.v14i4.8348. Hasil penelitian menunjukkan 4 (empat) indikator perbaikan yang telah dilakukan optimal. Tetapi, 2 (dua) indikator perbaikan belum dilakukan optimal dalam pemberdayaan UMKM Kampung Kue di Rungkut Lor Gang II Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
3. Apriliani, Afmi & Wahyudin, Cecep & Hastuti, Arti & Ramdani, Faisal & Andani, Herli & Irl, Sosa. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil pengabdian yang dilakukan kepada para pelaku UMKM di Desa Banjarsari menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pada pengukuran pre-test dan post-test. Rataan peningkatan pengetahuan dalam tatakelola kolaboratif untuk pengembangan UMKM sebesar 53%, hal demikian menggambarkan bahwa adanya keberhasilan dalam program pengabdian yang dilakukan sehingga pengabdian ini berdampak pada pengembangan umkm desa banjarsari dalam aspek tatakelola, produksi dan pemasaran.

4. Wanna, M. F. J. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Maladuk Distrik Klasafet Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam kolaborasi tersebut perlu diatasi agar tujuan program CSR dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan.
5. Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Tata Kelola Kolaboratif belum berhasil memberdayakan kelompok tani. Lembaga-lembaga masih bekerja secara terpisah, tanpa jaringan kolaborasi yang solid. Kelompok tani belum memahami cara membangun komitmen dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Tata kelola masih lemah akibat perbedaan pendapat, meskipun akses kekuasaan, akuntabilitas, dan berbagi informasi berjalan cukup baik. Namun, sumber daya manusia, teknis, dan keuangan masih belum memadai.
6. Noegroho, A. B. A., & Arif, L. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang UMKM Puduk di Kabupaten Gresik belum merasakan dampak signifikan dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, karena belum pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kolaborasi yang dijalankan.
7. Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis *Collaborative Governance* di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Desa Pananrang umumnya tergolong usaha mikro dengan omzet tahunan Rp37.000.000–Rp198.000.000. Dari 47 UMKM yang ada, hanya 7 yang menerapkan *Collaborative Governance*. Pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, kurangnya teknologi dan inovasi, manajemen pemasaran yang belum standar, serta minimnya modal usaha. Kolaborasi antara dinas terkait meliputi pembinaan, pendampingan, bantuan modal, dan kemudahan izin usaha. Program “Jabat Erat” juga memberikan seminar dan bantuan modal. Analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mengikuti *Collaborative Governance* mengalami pengembangan usaha.
8. Wijaya, K. A. S., Yudarta, I. P. D., Prabawati, N. P. A., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menuju Sustainable Tourism di Desa Wisata Taro Kabupaten Gianyar. Implementasi pengelolaan potensi alam di Desa Taro menekankan aspek keberlanjutan, namun masih terdapat peluang yang belum dimanfaatkan, seperti belum adanya produk khas desa. Pemberdayaan dilakukan melalui pelayanan kepada Kelompok Tani Perempuan dan UMKM dengan melibatkan tiga aktor dalam tata kelola kolaboratif: pemerintah melalui BUMDes Sarwada Amertha, masyarakat sebagai pelaku utama, dan sektor swasta melalui kolaborasi dengan industri pariwisata seperti penginapan dan resor.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dibandingkan studi sebelumnya melalui pendekatan yang berbeda, penggunaan data berdasarkan kondisi aktual, serta melibatkan informan yang lebih beragam. Fokus penelitian diarahkan pada isu khusus mengenai *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, yang merupakan permasalahan khas di lokasi studi. Perbedaan utama juga terletak pada penerapan teori efektivitas dari (Ansell dan Gash 2008), yang mencakup dimensi *Collaborative Process*, Kondisi Awal, Desain Institusi, dan Kepemimpinan, dengan analisis berbasis indikator yang dirumuskan secara spesifik.

#### 1.5 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kota Bandar Lampung

## II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, di mana tujuan utama penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang bagaimana *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM dapat dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengkaji *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM, yang di dalamnya terdapat interaksi antaraktor, proses yang berlapis, serta dinamika kelembagaan dan teknologi yang saling terkait. Metode ini dinilai ideal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksploratif dan interpretatif, karena memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Nurdin & Hartati (2019) menjelaskan bahwa metode riset kualitatif kerap diistilahkan sebagai metode naturalistik, mengingat pelaksanaannya berlangsung dalam setting alamiah. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai etnografi karena pada mulanya banyak diaplikasikan dalam studi antropologi budaya, dan disebut metode kualitatif karena sifat data yang dihimpun serta analisisnya bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Ardieansyah et al., 2023), pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk memahami kondisi suatu objek dalam keadaan alami, tanpa intervensi melalui eksperimen yang ketat atau terkontrol. Menurut Crowther & Lauesen (2017), penelitian kualitatif diutarakan melalui bahasa sehari-hari, memanfaatkan sampel berukuran kecil yang dipilih berdasarkan kesempatan (oportunistik) atau tujuan tertentu (purposif), dan kerap memusatkan perhatian pada individu, kejadian, serta konteks spesifik. Simangunsong (2017:192) menegaskan bahwa esensi dari metode ini terletak pada upaya penggalian makna yang subjektif dan terikat pada pengalaman individual setiap partisipan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran, kewenangan, dan pengetahuan spesifik mereka yang dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah karena mereka merupakan aktor kunci dalam ekosistem *Collaborative Governance* pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung. Informan dari unsur pemerintah mencakup Kepala Dinas Koperasi dan UKM sebagai penanggung jawab kebijakan strategis untuk memahami visi dan landasan pengambilan keputusan; Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM untuk menggali aspek teknis dan koordinasi internal program; serta Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat/Manusia sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan yang dapat memberikan data operasional. Selain itu, dipilih pula perwakilan dari perbankan sebagai representasi stakeholder non-pemerintah yang krusial dalam menganalisis efektivitas kemitraan terkait akses permodalan. Terakhir, pelaku

UMKM dilibatkan sebagai informan utama yang menjadi subjek sekaligus penerima manfaat kebijakan, di mana perspektif mereka sangat vital untuk memvalidasi efektivitas program serta menggali makna subjektif dan pengalaman individual mereka sesuai esensi metode kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengukur *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh (Ansell dan Gash 2008). Menurut Ansell dan Gash, terdapat empat elemen kunci dalam *Collaborative Governance*, yaitu:

1. *Collaborative Process*
2. Kondisi Awal
3. Desain Institusi
4. Kepemimpinan

#### 3.1 *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung

##### 3.1.1 *Collaborative Process*

*Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, perbankan, dan pelaku usaha kecil. Salah satu aspek utamanya adalah *collaborative process*, yaitu bagaimana interaksi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan berlangsung dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM. Proses kolaboratif ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil.

##### 1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka telah menjadi landasan komunikasi dalam proses kolaborasi, meskipun intensitas dan jangkauannya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung secara rutin memfasilitasi forum ini untuk menyerap aspirasi, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, "Kami secara rutin mengadakan pertemuan dengan pelaku UMKM untuk mendengarkan aspirasi mereka. Forum diskusi ini kami lakukan dalam bentuk Musrenbang, pertemuan dengan asosiasi UMKM, serta lokakarya bisnis". Pelaku UMKM pun merasakan manfaatnya, di mana seorang pemilik usaha makanan olahan menyatakan, "Dialog seperti ini sangat membantu kami memahami kebijakan yang sedang dirancang dan memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kendala yang kami hadapi". Meskipun demikian, ia berharap agar frekuensi dialog dapat ditingkatkan untuk melibatkan lebih banyak UMKM.

##### 2. Membangun kepercayaan

Kepercayaan antara pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan *Collaborative Governance*. Pemerintah berupaya membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan evaluasi program secara berkala. Di sisi lain, sektor perbankan melakukan edukasi manajemen keuangan untuk meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam mengakses pembiayaan. Pelaku UMKM mengakui bahwa program pendampingan dan pelatihan dari pemerintah berhasil meningkatkan kepercayaan mereka. Dapat disimpulkan

bahwa upaya membangun kepercayaan telah dilakukan, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan keyakinan UMKM terhadap kebijakan yang ada.

### 3. **Komitmen terhadap proses**

Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada komitmen timbal balik antara pemerintah dan pelaku UMKM. Pemerintah menunjukkan komitmennya melalui program berkelanjutan, di mana Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM menyatakan, "...yang kami harapkan adalah adanya komitmen dari UMKM itu sendiri untuk mengikuti proses ini hingga tuntas dan menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan". Namun, komitmen dari sisi pelaku UMKM masih menjadi tantangan, seperti yang diakui oleh seorang pelaku usaha, Bapak Ahmad Fauzi, "Saya pernah mengikuti program pelatihan bisnis, tetapi tidak semua peserta benar-benar serius dalam menerapkannya. Ada beberapa yang hanya mengikuti di awal tetapi tidak melanjutkan pendampingan berikutnya".

### 4. **Pemahaman bersama**

Masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaku UMKM yang perlu dijumpai melalui komunikasi yang lebih efektif. Pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi. Namun, kendala dari sisi UMKM diungkapkan oleh Ibu Siti Aminah, "Kadang kami kesulitan memahami kebijakan baru karena istilah yang digunakan terlalu teknis. Kami berharap ada penjelasan yang lebih sederhana agar kami lebih mudah memahami kebijakan yang berlaku".

### 5. **Pencapaian hasil**

Pada akhirnya, proses kolaborasi ini telah menunjukkan hasil nyata yang positif dan terukur bagi pemberdayaan UMKM. Keberhasilan ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan, "Kami telah melihat peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas setelah mengikuti program pemberdayaan. Beberapa dari mereka telah berhasil masuk ke pasar nasional, bahkan ada yang mulai menembus pasar ekspor". Dampak positif ini juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha seperti Bapak Ahmad Fauzi yang mengungkapkan, "Setelah mengikuti program pendampingan bisnis dan digitalisasi, penjualan saya meningkat drastis. Saya juga mulai bekerja sama dengan lebih banyak pemasok dan mitra bisnis, yang sebelumnya sulit saya jangkau."

(Gambar) Diagram Indikator Dimensi *Collaborative Process*

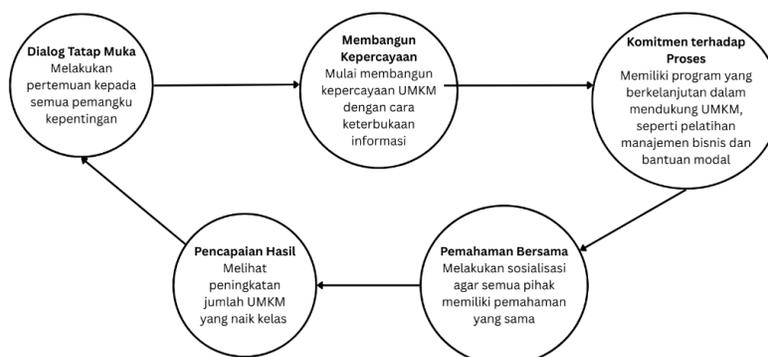


Diagram di atas menggambarkan bagaimana *collaborative process* terjadi pada pemberdayaan UMKM yang memberikan hasil positif dalam masyarakat, dimulai dari dialog tatap muka hingga pencapaian hasil telah dilakukan pada *collaborative process* ini.

### **3.1.2 Kondisi Awal**

Sebelum suatu kolaborasi dapat berjalan secara efektif, penting untuk memahami kondisi awal yang menjadi dasar dari kerja sama antar pemangku kepentingan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, kondisi awal ini mencakup tingkat kepercayaan awal antar *stakeholder* (pemerintah dan masyarakat) serta keseimbangan distribusi sumber daya dan kekuasaan. Faktor-faktor ini sangat menentukan sejauh mana proses kolaborasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat nyata bagi UMKM.

#### **1. Tingkat kepercayaan awal antar stakeholder (pemerintah dan Masyarakat)**

Tingkat kepercayaan awal antara pemerintah dan pelaku UMKM pada awalnya bervariasi dan cenderung rendah. Banyak pelaku UMKM merasa skeptis dan ragu terhadap efektivitas program pemerintah, didasari oleh persepsi bahwa prosedur akses bantuan terlalu sulit atau hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah memiliki koneksi. Pemerintah menyadari tantangan ini dan secara aktif berupaya membangun kepercayaan melalui komunikasi yang lebih transparan dan pembuktian manfaat program secara nyata. Kepercayaan ini terbukti mulai terbangun ketika pelaku UMKM merasakan langsung manfaat dari program pelatihan dan pendampingan yang mereka ikuti.

#### **2. Keseimbangan distribusi sumber daya dan kekuasaan**

Pada kondisi awal terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan antar pemangku kepentingan. UMKM yang skalanya lebih besar dan sudah mapan cenderung lebih mudah mengakses bantuan, permodalan, dan program kemitraan karena dianggap lebih siap secara administratif dan memiliki rekam jejak bisnis yang lebih kuat. Hal ini menciptakan kesenjangan akses yang signifikan, di mana UMKM skala mikro atau yang baru merintis mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Pemerintah menyadari adanya tantangan ini dan berupaya memberikan pendampingan khusus kepada UMKM mikro agar mereka bisa lebih siap dalam memanfaatkan program yang ada.

### **3.1.3 Desain Institusi**

Dalam *Collaborative Governance*, desain institusi berperan penting dalam menentukan bagaimana kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam desain institusi adalah keberadaan aturan partisipasi yang jelas, yang memastikan bahwa setiap pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun UMKM, memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM. Keberadaan aturan partisipasi yang jelas memungkinkan UMKM untuk mengetahui bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, mengakses bantuan yang disediakan, serta mekanisme yang harus diikuti untuk mendapatkan manfaat dari berbagai program yang tersedia. Namun, dalam praktiknya, tidak semua UMKM memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan partisipasi ini, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang usaha.

#### **1. Keberadaan aturan partisipasi yang jelas**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara formal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan aturan partisipasi yang jelas melalui peraturan daerah dan pedoman teknis untuk program pemberdayaan UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa informasi mengenai syarat dan prosedur partisipasi selalu disampaikan melalui forum sosialisasi dan situs resmi pemerintah. Pihak perbankan, seperti BRI, juga mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam menyalurkan kredit dan bekerja sama untuk meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme yang ada.

Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal sosialisasi dan pemahaman. Dari perspektif pelaku UMKM, aturan partisipasi tersebut masih dianggap kurang jelas dan sulit diakses. Banyak pelaku usaha yang merasa informasi tidak tersebar secara merata dan prosedurnya rumit, sehingga mereka harus mencari informasi secara mandiri. Kurangnya pemahaman ini menjadi penghambat bagi UMKM, terutama skala kecil, untuk dapat berpartisipasi aktif dan memanfaatkan program yang tersedia. Dengan demikian, meskipun kerangka aturan telah ada, efektivitasnya berkurang karena kesenjangan komunikasi dan distribusi informasi antara pemerintah dan para pelaku UMKM..

### **3.1.4 Kepemimpinan**

Dalam *Collaborative Governance*, kepemimpinan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus mampu membangun komunikasi yang terbuka, memfasilitasi dialog antar *stakeholder*, serta menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung, kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan organisasi UMKM menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.

#### **1. Kemampuan pemimpin memfasilitasi dialog antar stakeholder**

Berdasarkan analisis di lapangan, para pemimpin di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memfasilitasi dialog antar *stakeholder*. Mereka secara aktif membuka ruang komunikasi melalui forum seperti Musrenbang dan pertemuan rutin untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah, pelaku UMKM, dan sektor swasta, termasuk lembaga keuangan. Pihak perbankan (BRI) mengonfirmasi bahwa dialog ini membantu mereka memahami kendala yang dihadapi UMKM dan menyesuaikan skema pembiayaan. Namun, dari perspektif pelaku UMKM, fasilitasi dialog ini dirasa masih perlu ditingkatkan. Mereka merasa bahwa forum yang ada belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi UMKM skala mikro, sehingga suara mereka seringkali belum terdengar secara optimal dalam proses pengambilan keputusan

#### **2. Komitmen**

Komitmen para pemimpin, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung sudah terlihat jelas. Pemerintah daerah menunjukkan komitmennya melalui alokasi anggaran khusus dan penyelenggaraan program-program berkelanjutan yang dilengkapi mekanisme evaluasi. Sektor perbankan juga berkomitmen mendukung UMKM melalui penyediaan skema kredit dan program literasi keuangan. Meskipun demikian, dari sudut pandang pelaku UMKM, komitmen ini terkadang

dirasa kurang konsisten dalam pelaksanaannya. Program seringkali bersifat sesaat tanpa pendampingan lanjutan yang memadai. Oleh karena itu, meskipun komitmen kebijakan sudah ada, diperlukan penguatan pada keberlanjutan implementasi program agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang nyata bagi perkembangan UMKM.

### 3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini memperkuat dan selaras dengan beberapa studi sebelumnya. Temuan bahwa program pelatihan dan pendampingan berhasil meningkatkan kapasitas UMKM hingga "naik kelas" sejalan dengan studi oleh Apriliani, et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM secara signifikan. Selain itu, tantangan-tantangan yang teridentifikasi di Bandar Lampung, seperti kurangnya sinkronisasi, komitmen yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya, juga ditemukan dalam penelitian Wanna (2024) di Sorong dan Sari (2024) di Desa Pananrang, yang mengindikasikan bahwa ini adalah kendala umum dalam implementasi *Collaborative Governance*. Studi Sari (2024) juga mendukung premis utama penelitian ini, yaitu pelaku usaha yang menerapkan *Collaborative Governance* mengalami pengembangan usaha, sebuah fenomena yang terjadi di Bandar Lampung dalam skala yang lebih luas. Model kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ditemukan di Bandar Lampung juga divalidasi oleh penelitian Wijaya, et al. (2024) di Desa Wisata Taro, yang menekankan model tiga aktor sebagai kunci pemberdayaan.

Di sisi lain, temuan penelitian ini memberikan sebuah nuansa yang berbeda jika dibandingkan dengan studi yang menunjukkan kegagalan *Collaborative Governance*. Fatimah, et al. (2021) menemukan bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani di Wajo tidak berhasil karena lembaga bekerja secara terpisah serta minimnya komitmen dan kepercayaan. Berbeda dengan kasus di Wajo, penelitian di Bandar Lampung menunjukkan bahwa meskipun tantangan serupa (komitmen dan kepercayaan) ada, kolaborasi tetap dapat berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan adanya faktor pembeda yang krusial, yaitu peran kepemimpinan yang aktif dalam memfasilitasi dialog dan adanya desain institusi (seperti forum Musrenbang) yang berfungsi sebagai wadah interaksi, sekalipun belum sempurna. Selanjutnya, temuan dari Noegroho & Arif (2022) di Gresik yang menyatakan bahwa UMKM tidak merasakan dampak signifikan karena tidak pernah dilibatkan dalam proses kolaborasi, justru semakin mempertegas pentingnya salah satu elemen kunci keberhasilan di Bandar Lampung. Meskipun partisipasi UMKM di Bandar Lampung dinilai belum optimal dan inklusif, keberadaan mekanisme partisipasi itu sendiri menjadi faktor pembeda vital yang mencegah kegagalan total seperti yang terjadi di Gresik. Ini menunjukkan bahwa bahkan tingkat partisipasi yang terbatas lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyajikan sebuah studi kasus keberhasilan implementasi *Collaborative Governance* yang tidak monolitik, melainkan diwarnai oleh berbagai tantangan operasional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa meskipun dihadapkan pada kendala-kendala umum seperti yang diidentifikasi penelitian sebelumnya, adanya kepemimpinan yang fasilitatif, desain institusi yang fungsional, dan proses dialog yang terlembagakan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi pemberdayaan UMKM.

## IV. KESIMPULAN

Penerapan *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung menunjukkan sebuah proses yang berjalan dinamis dengan hasil yang positif, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Proses kolaboratif telah berhasil dijalankan, diawali dengan dialog tatap muka antara pemangku kepentingan, yang kemudian secara bertahap membangun kepercayaan UMKM terhadap program pemerintah melalui keterbukaan informasi dan program pendampingan. Komitmen dari pemerintah terlihat melalui program yang berkelanjutan, dan meskipun komitmen dari sisi UMKM masih menjadi tantangan, proses ini telah menghasilkan pencapaian nyata, seperti peningkatan jumlah UMKM yang "naik kelas" dan berhasil menembus pasar nasional. Meskipun demikian, keberhasilan ini tidak lepas dari kondisi awal di mana terdapat ketidakseimbangan akses sumber daya yang menguntungkan UMKM yang lebih mapan, serta tingkat kepercayaan yang awalnya rendah dari pelaku usaha. Selain itu, desain institusi yang ada, meskipun memiliki aturan partisipasi yang jelas secara formal, efektivitasnya berkurang akibat kesenjangan komunikasi dan pemahaman di tingkat UMKM yang menganggap prosedur masih rumit dan informasi sulit diakses. Kepemimpinan dari pemerintah daerah dinilai cukup baik dalam memfasilitasi dialog, namun dari perspektif UMKM, implementasi komitmen dirasa masih kurang konsisten dan forum yang ada belum sepenuhnya inklusif untuk usaha skala mikr.

**Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan waktu dan biaya menjadi kendala utama dalam penelitian ini, sehingga menghambat penulis untuk memperluas cakupan data dan melakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa depan didukung dengan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih bersifat awal dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah yang sama dengan menitikberatkan pada topik *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi tertinggi penulis tujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan seluruh jajarannya atas kesempatan berharga untuk melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang kontribusi dan dukungannya telah memastikan kelancaran seluruh proses riset ini.

## VI. Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Arbianti, S. (2024). Empowerment of Small and Micro Enterprises (SMEs) in Indonesia: The Impact Venture Capital Assistance, Entrepreneurial Orientation, and Digital Transformation on the Performance of SMEs. *Journal of Management Studies and Development*, 3(03), 169-178. [Empowerment of Small and Micro Enterprises \(SMEs\) in Indonesia: The Impact Venture Capital Assistance, Entrepreneurial Orientation, and Digital Transformation on the Performance of SMEs | Journal of Management Studies and Development](#)
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). Metodologi Penelitian Sosial (1st ed.). Deepublish
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in theory and practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4):543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, Afmi & Wahyudin, Cecep & Hastuti, Arti & Ramdani, Faisal & Andani, Herli & Irl,

- Sosa. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat. 10. 275-286. 10.30997/qh.v10i3.15865. [\(PDF\) Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan](#)
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. (2017). Qualitative methods. *Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility*, 225–229. <https://doi.org/10.4324/9781315672632-5>
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294-307. [Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo | Fatimah | Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik \(KIMAP\)](#)
- Negari, N. L., A. Riski, A. Pradjaningsih, dan A. Kamsyakawuni. 2022. “Decision-making using fuzzy TOPSIS for selecting beginner UMKM that receive business funding.” *Journal of Physics: Conference Series* 2157(1). doi: 10.1088/1742-6596/2157/1/012021. [Decision-making using fuzzy TOPSIS for selecting beginner UMKM that receive business funding - IOPscience](#)
- Noegroho, A. B. A., & Arif, L. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405-1414. [COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM PUDAK DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK | Journal Publicuho](#)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Putri, Zora Febriena Dwithia Hidayat, dan Ranitya Ganindha. 2022. “Pengembangan Potensi Produksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pondok Pesantren Melalui Pendampingan Hak Kekayaan.” 5(169):67–83. doi: 10.30996/jhbhc.v5i1.5785. [Pengembangan Potensi Produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pondok Pesantren melalui Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual - Neliti](#)
- Rahmawati, Dewi & Nawangsari, Ertien. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pada Umkm Kampung Kue. *Jurnal Kebijakan Publik*. 14. 507. 10.31258/jkp.v14i4.8348. [\(PDF\) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA UMKM KAMPUNG KUE](#)
- Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis *Collaborative Governance* di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). [Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah \(UMKM\) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu - Repository IAIN PAREPARE](#)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Wanna, M. F. J. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Maladuk Distrik Klasafet Kabupaten Sorong. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1). [COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG MALADUK DISTRIK KLASAFET KABUPATEN SORONG | Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan](#)
- Wijaya, K. A. S., Yudhartha, I. P. D., Prabawati, N. P. A., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menuju Sustainable Tourism di Desa Wisata Taro Kabupaten Gianyar. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 475-487. [Collaborative](#)

*Governance dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menuju Sustainable Tourism di Desa Wisata Taro Kabupaten Gianyar | Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*

